

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu dibutuhkan suatu perencanaan untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Conyers (1991), perencanaan adalah upaya sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan menurut Grath adalah proses yang digunakan untuk memilih dan membangun tindakan terbaik untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa elemen penting yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dimulai). Dengan demikian, perencanaan dapat diartikan sebagai respon terhadap kemungkinan hal di masa mendatang.

Pembangunan merupakan sebuah multifase yang melibatkan beragam transisi secara mendasar mulai dari struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi semakin cepat, mengatasi perbedaan, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pembangunan adalah proses perubahan sosial yang melibatkan banyak aktor untuk mencapai kesejahteraan rakyat Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan kebaikan bersama. Pembangunan nasional bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi seluas-luasnya. Pembangunan daerah adalah bagian dari

pembangunan nasional dan dilakukan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dan pusat harus selaras dan sinkron. Pembangunan daerah biasanya memperhatikan kondisi dan potensi setiap daerah yang disesuaikan dengan dinamika pembangunan nasional.

Ketidakmerataan infrastruktur di Indonesia masih belum terselesaikan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerangka kerja telah diperbarui akan menarik investor untuk proyek infrastruktur dengan meningkatkan daya saing nasional untuk memprioritaskan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga untuk mempercepat pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, mendorong investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Otonomi Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah, dunia usaha, dan semua stakeholder lainnya yang ikut bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan jangkauan yang terbatas sehingga membutuhkan perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat juga berkewajiban menyelaraskan pembangunan yang dihelat pemerintah daerah agar sejalan dengan pembangunan nasional. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga tercipta keseimbangan pembangunan antar daerah. Realisasi otonomi daerah berkaitan

dengan tiga hal yang jelas, stabilitas hukum, efisiensi, efektivitas pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur ini berbeda-beda di setiap daerah. Pembangunan wilayah di Indonesia tidak merata. Banyak negara memiliki infrastruktur yang tidak merata. Kota Semarang termasuk kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. ini bisa dapat dilihat dari PRDB Provinsi Jawa Tengah. Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019-2023 berdasarkan gambar berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kab. Cilacap	104.543	109.654	121.022	132.425
2. Kab. Banyumas	53.682	56.920	62.817	68.752
3. Kab. Purbalingga	25.094	26.394	28.824	31.225
4. Kab. Banjarnegara	21.694	22.828	24.996	27.191
5. Kab. Kebumen	28.015	29.563	32.615	35.764
6. Kab. Purworejo	18.646	19.603	21.353	23.188
7. Kab. Wonosobo	18.839	19.857	21.587	23.330
8. Kab. Magelang	32.462	34.176	37.432	40.680
9. Kab. Boyolali	32.688	34.897	38.789	42.736
10. Kab. Klaten	39.940	42.271	46.592	51.274
11. Kab. Sukoharjo	36.891	38.990	42.781	46.521
12. Kab. Wonogiri	29.167	30.581	33.692	36.943
13. Kab. Karanganyar	37.023	39.157	43.088	47.204
14. Kab. Sragen	37.851	40.088	44.243	48.570
15. Kab. Grobogan	27.269	28.815	31.807	34.759
16. Kab. Blora	24.004	26.929	39.960	31.753
17. Kab. Rembang	18.944	20.071	22.107	24.130
18. Kab. Pati	43.289	45.566	50.119	54.775
19. Kab. Kudus	109.539	108.725	114.565	121.310
20. Kab. Jepara	30.175	32.046	35.011	38.023
21. Kab. Demak	26.547	27.650	30.252	33.017
22. Kab. Semarang	49.047	51.796	56.640	61.284
23. Kab. Temanggung	21.557	22.628	24.726	26.912
24. Kab. Kendal	49.047	51.796	56.640	61.284
25. Kab. Batang	21.557	22.628	24.726	26.912
26. Kab. Pekalongan	22.802	24.030	29.915	32.355
27. Kab. Pemalang	25.821	27.444	29.915	32.355
28. Kab. Tegal	35.300	37.335	40.770	44.440
29. Kab. Brebes	47.059	48.966	53.709	57.599
30. Kota Magelang	8.713	9.179	10.073	10.983
31. Kota Surakarta	47.622	50.372	55.849	60.486
32. Kota Salatiga	13.272	204.871	15.381	16.773
33. Kota Magelang	188.732	11.461	227.374	248.903
34. Kota Surakarta	10.849	16.017	12.591	13.744
35. Kota Tegal	15.225	16.017	17.680	19.162
Jml Kab/Kota Total of Reg/Num	1.346.505	1.421.178	1.560.432	1.696.570
Provinsi/Province	1.347.222	1.419.735	1.559.571	1.696.795

Sumber : BPS Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan Data Tabel Tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019 sampai 2023, Kota Semarang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tadinya melambat -1,85 persen di 2020, menjadi cepat tumbuh sebesar 5,16 persen pada tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada 2023, tumbuh 5,79 persen, tertinggi se-Jawa Tengah. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2022 lalu sebesar 5,73 persen. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditunjang dengan salah satu sektor strategis yaitu infrastruktur jalan.

Pemerintah, bagaimanapun, memainkan peran terpenting dalam proses ini. Perencanaan pembangunan mengarahkan cara menggunakan sumber daya pembangunan yang terbatas untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik dengan lebih efektif dan efisien (Listyaningsih,2014:92). Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk program pemberdayaan atau pembangunan berhasil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu, sistem perencanaan diterapkan secara berjenjang, mulai dari desa, selama proses perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Kota Semarang diselenggarakan dengan didasarkan pada visi yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI ber Bhineka Tunggal Ika. Visi tersebut diwujudkan dalam Misi sebagai berikut :

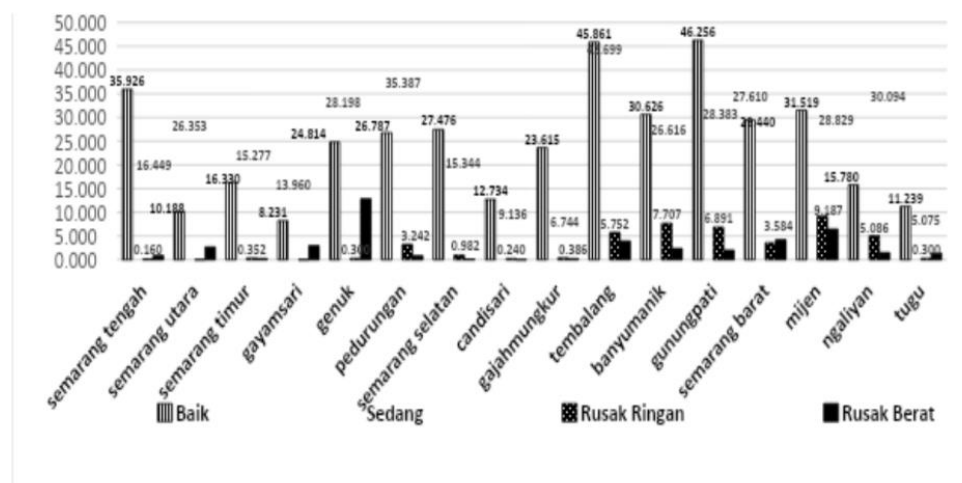
1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keadilan;

2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan penelitian dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan melindungi kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara adil
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang memperhatikan dampak lingkungan dalam mendukung kemajuan kota
5. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun peraturan yang sesuai nilai-nilai Pancasila

Kondisi infrastruktur jalan bisa dilihat berdasarkan informasi dari RPJMD

Kota Semarang Tahun 2021-2023 Sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Kota Semarang Tahun 2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 839.901 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai 731.013 meter (87,04%), kondisi sedang sepanjang 47.108 meter (5,61%), (atau jalan kondisi mantap sepanjang 778.121 meter atau sebesar 92,64%), sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 37.855 meter (4,51%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.925 meter (2,85%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk (30,06% dari total panjang jalan dengan kondisi rusak berat), Tembalang (9,27%), dan Mijen (15,13%) dan Semarang Barat (9,89%)

Implementasi infrastruktur di Kota dapat dilihat berdasarkan data dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Perkembangan Bidang Infrastruktur Jalan di Kota Semarang tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
a.	Pekerjaan Umum :						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	88,07	91,11	89,54	89,65	92,64	Belum Tercapai
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	75,5	76	77	78	79	Belum Tercapai
3	Penyediaan air baku	87,50%	87,50%	87,5%	87,5%	87,5%	Tercapai
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	636,25	658,18	752,05	752,97	778,12	Belum Tercapai
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44,1	44	32	32	32,00	Belum Tercapai
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,5	82	80	80	95,85	Tercapai
8	Persentase irigasi dalam kondisi baik	75	76	77	78	79	Belum Tercapai
9	Persentase penanganan sampah	87,58	87,5	88,5	89	89,5	Belum Tercapai
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	88,50	88,50	95,33	95,40	96,28	Belum Tercapai
12	Rumah tangga ber- Sanitasi (%)	85,87	86,08	86,26	86,46	86,51	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data tabel diatas, maka ketercapaian infrastruktur jalan di Kota Semarang belum tercapai secara maksimal dikarenakan untuk proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang masih fluktuatif dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen, sedangkan di tahun berikutnya tahun 2017 ke tahun 2018 data mengalami penurunan sebesar 1,66 persen. Selain itu di tahun 2019 ke tahun 2020 data kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang mengalami kenaikan sebesar 2,99 persen.

Penyediaan dan pemeliharaan jalan juga belum maksimal karena tidak semua jalan dilengkapi dengan fasilitas standar, terdapat titik-titik rawan kemacetan dan jalan kawasan strategis belum optimal. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun 2023 meliputi perbaikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut, Jalan Hamka Profesor, Jalan MT Haryono, Jalan Simpang Palawan, Tugu Muda, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajah Mada. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui DPU Semarang terus mempercepat banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang cukup besar yang diperlukan untuk proyek tersebut. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama partisipasi antara pemerintah dan masyarakat dalam agar implementasi program pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Winarendra Imam Prakoso dan Ari Subowo pada tahun 2018 yang berjudul menyatakan bahwa musrenbang di Kota Semarang belum efektif karena tidak ada kesempatan masyarakat dalam memberikan pendapatanya. Belum dilakukan secara terbuka dan saling percaya. Pada proses perumusan masalah tidak dilaksanakan secara tepat dikarenakan dilakukan pada sebelum Musrenbang Kecamatan yang hanya di hadiri oleh pengurus Kecamatan, Kelurahan dan LPMK tanpa di hadiri oleh masyarakat umum. Pada proses identifikasi daya dukung berupa uang, tanpa memperhatikan secara detil daya dukung yang merupakan potensi di wilayah tersebut. Tingkat partisipasi belum tercapai dengan maksimal usulan-usulan yang telah di disampaikan pada musrenbang Kelurahan yang tidak semuanya dapat terakomodir dikarenakan adanya usulan-usulan dari Kelurahan lain yang lebih prioritas selain itu adanya interaksi saling bertukar informasi di antara stakeholders.

Sistem demokrasi Indonesia mencakup komponen partisipasi masyarakat. Conyers (1991) menguraikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat memberikan informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap warga, masyarakat akan lebih percaya terhadap program kegiatan pembangunan jika mereka terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan dan masyarakat lebih banyak kesempatan untuk mengetahui tentang apa yang diinginkan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat bisa diwujudkan dengan cara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Indonesia menetapkan bagaimana musrenbang ini akan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Menurut Pasal I Undang-Undang, musrenbang adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk menyusun program pembangunan nasional dan daerah. Menurut pasal 9, kegiatan musrenbang tersebut tercakup dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah .

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, musrenbang dilaksanakan di tingkat nasional oleh Bappenas dan di daerah diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda). Musrenbang Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kota Semarang. Musrenbang Kota Semarang Tahun untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan pada Selasa, 18 April 2023 di Gedung Ikhsan Lantai 8. Musrenbang ini dihadiri oleh

Walikota Semarang, Forkopimda Kota Semarang, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Semarang, Muspida Plus, Instansi vertikal, BUMD, Camat, Delegasi perwakilan kecamatan, Perguruan tinggi/akademisi, Organisasi kemasyarakatan, LSM, Tokoh masyarakat, Organisasi wanita di Kota Semarang, dan Bappeda di wilayah Kedungsepur. Dengan total peserta musrenbang 218 orang.

Untuk usulan yang masuk dalam Musrenbang RKPD Kota Semarang Tahun 2024 sebagian besar usulan yang masuk dari masyarakat tentang jalan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Usulan Musrenbang RKPD Kota Semarang di Non Fisik

No	Usul	Kecamatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	Pengadaan dan Peremajaan Alat Posyandu	Semarang Utara	Jl. Ronggowarsito No. 42 A Rt 08 Rw 01 Tanjungmas	16 Lokasi	Diakomodir
2	Sosialisasi PBHS	Semarang Barat	Jl Abdurahman Saleh No. 231 Rt 1 Rw 9 Kembangrum	14 Lokasi	Diakomodir
3	Penyuluhan Mengenai Lansia	Gunungpati	Kelurahan Sadeng Rt 06 Rw 02	1 Kegiatan	Diakomodir
4	Pelatihan Penangan Dampak Penyakit	Gajahmungkur	Jalan Menoreh Raya Rt 03 Rw 05 Kelurahan Sampangan	1 Kegiatan	Diakomodir
5	Pengadaan alat tensi dan cek	Candisari	Jl. Singgalang I/1 Rt 6 Rw 1 Wonotingal	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
6	Pelatihan Linmas pada Kelurahan Sadeng	Gunungpati	Kelurahan Sadeng Rt 6 Rt	75 orang	Diakomodir

7	Sosialisasi Pedagang Kaki lima di lingkungan	Pedurungan	Jl. Taman Tlogomulyo No 1 Rt 005	50 orang	Diakomodir
8	Sosialisasi bahaya Narkoba	Plamongsari	Balai Kelurahan Plamongsari rt 3 Rw 9	50 orang	Tidak Diakomodir
9	Pelatihan refleksi	Candisari	Jl. Lompobatang No. 22 Rt 05 Rw	50 orang	Tidak Diakomodir
10	Pelatihan tata boga	Semarang Timur	Balai Kelurahan Mlatibaru	40 Peserta	Diakomodir
11	Pelatihan Menjahit	Candisari	Kelurahan Wonotingal	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
12	Pelatihan keterampilan pengelasan listrik dan karbida	Pedurungan kidul	Balai kelurahan pedurungan kidul Rw 1 Rt	50 buah	Tidak diakomodir
13	Sosialisasi pentingnya merencanakan jarak kehamilan untuk	Gajahmungkur	Balai kelurahan karangrejo rt 03 rw 03 karangrejo	30 Peserta	Diakomodir
14	Sosialisasi dan penguatan kepda masyarakat terkait keluarga	Banyumanik	Jalan Teuku Umar No 56 Rt 1 Rw 1 Ngesrep	40 Peserta	Diakomodir
15	Pelatihan Merias Pengantin	Gunungpati	Balai Kelurahan kandri Rt 05 Rw 01 Kandri	1 kegiatan	Diakomodir
16	Kirab Budaya Resik Waduk Jatibarang	Mijen	Balai 1 Kelurahan Kandri Rt 05 Rw	1 kegiatan	Diakomodir
17	Pengajian	Candisari	KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 01 KRAMAS	1 kegiatan	Tidak akomodir
18	Pelatihan pembuatan baki lamaran	Banyumanik	Jl Jatingaleh III No 391 A Rt 01 Rw 04 jatingaleh	1 kegiatan	Tidak diakomodir

Sumber: Dokumen Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang RKPD Kota Semarang di Fisik

No	Kegiatan	Kategori	Kecamatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1	Pembangunan SDN Bongsari 01	Bangunan	Tugu	Jl. Condrokusumo RT 9 RW 2 BONGSARI	1 unit	Tidak Diakomodir
2	Rehab Gedung Pos paud	Bangunan	Semarang Barat	Kantor kelurahan Jerakah RT 4 RW 3 JERAKAH	1 unit	Tidak Diakomodir
3	Pembangunan Gedung Paud	Bangunan	Tugu	Kelurahan Mangkang Kulon RT 05 RW 04 MANGKANG KULON	1 unit	Tidak Diakomodir
4	SMP Negeri	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dempel Lor RT 0 RW 23 MUKTIHARJO KIDUL	1 unit	Tidak Diakomodir
5	Pembinaan siswa PAUD / Pesantren mini, TPQ (Al Mansuri), pengadaan kursi meja dan buku bacaan	Bangunan	Tembalang	KELURAHAN KRAMAS RT 01 RW 01 KRAMAS	1 kegiatan	Diakomodir
6	Pembangunan Puskesmas Tlogosari Wetan	Bangunan	Pedurungan	Jl. Dolog Lor RT 10 RW 01 TLOGOSARI WETAN	1500 meter	Diakomodir
7	Perbaikan saluran air dan grill	Bangunan	Semarang Selatan	Jl. Basudewa (SDN Bulustalan) RT 8 RW 4 BULU STALAN	1500 meter	Diakomodir
8	Normalisasi Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. HOS Cokroaminoto Raya dan 4 RT 02 RW 03 BARUSAR	150 meter	Diakomodir
9	Pembangunan saluran drainase jl. kalisari baru rt 6 rw 5	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Kalisari Baru RT 06 RW 05 BARUSARI	750 meter	Diakomodir
10	Normalisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Suyudono RT 01,02 RW 04 BARUSARI	200 meter	Diakomodir

11	Normalisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Kyai Saleh RT 03 RW 02 MUGASSARI	675 m ²	Diakomodir
12	Perbaikan Talud dan Saluran Air	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Gergaji RT 05,06 RW 05 MUGASSARI	375 m	Tidak Diakomodir
13	Pengaspalan	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Menteri Supeno (Pertigaan jahe Rempah Mbahjo sampai menteri Supeno RT 01 RW 05 MUGASSARI	800 m	Tidak Diakomodir
14	Normalisasi Saluran	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Singosari Raya RT 001 RW 006 PLEBURAN	210 meter	Tidak Diakomodir
15	Rusak	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Wonodri Baru Raya No 54 dan Wonodri Baru Raya No 52 RT 05 RW 02 WONODRI	660 meter	Tidak Diakomodir
16	Pembuatan Talud pinggir sungai dan bahu jalan	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Singosari Timur (belakang PIP) RT 1, 3, 4, 2 RW 1, 7, 12 WONODRI	1227 meter	Diakomodir
17	Rusak	Jalan	Semarang Selatan	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono RT 3.4 RW 10 WONODIRI	660 metere	Diakomodir
18	Pekerjaan renovasi trotoar jalan protokol	Jalan	Semarang Selatan	jl kompol maksum RT 6,7 RW 7 PETERONGAN	1252 meter	Tidak Diakomodir
19	PAGER BRC UNTUK TALUD PERBATASAN PANGGUNG KIDUL	Jalan	Semarang Utara	JL. SRIKANDI RT 10 RW 3 PLOMBOKAN	500 meter	Tidak Diakomodir
20	Betonisasi	Jalan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 0 RW 0 PURWOSARI	20000 meter	Diakomodir
21	Crossing	Jalan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 08 RW 04 PURWOSARI	45 meter	Diakomodir

22	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	Jalan	Semarang Utara	JL. TANAH MAS RAYA RT 1 S/D 2 RW 5 RT 1 RW 5 KUNINGAN	750 meter	Tidak diakomodir
23	Peninggian Jembatan	Jembatan	Semarang Utara	Jl. Hasanudin RT 0 RW 0 PANGGUNG LOR	3 per titik	Diakomodir
24	Peninggian Talud Kalibaru	Jalan	Semarang Utara	Jl Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno RT 3, 5, 6 RW 7 - 10 BANDARHARJO	1000 meter	Diakomodir
25	Pelebaran Jembatan dan Peninggian Pintu Masuk SMP Negeri 31	Jembatan	Semarang Barat	Jl. Tambakharjo RT 0 RW 7 TAMBAKHARJO	50 meter	Tidak Diakomodir
26	Pembangunan Saluran dan Normalisasi	Jalan	Semarang Barat	Jl. Sri Rejeki Utara RT 04 RW 05 KALIBANTENG KIDUL	250 meter	Diakomodir
27	Pembuatan Saluran Drainase dengan Culvert dan U-Dith dengan Tutup	Jalan	Semarang Barat	Jl Puspanjolo Tengah, Dalam dan Timur RT 00 RW 01 CABEAN	2000 meter	Diakomodir
28	Pengaspalan Jalan	Jalan	Semarang Barat	Jl. Saptamarga RT 0 RW 4 KEMBANGARUM	500 meter	Diakomodir
29	Pengerukan saluran Jalan Ronggowarsito Jl. Margorejo Barat RT 01 RW 04 dan Jl. Spoorlan RT 01, 02, 03 RW 03	Jalan	Semarang Timur	Jalan Ronggowarsito Jl. Margorejo Barat RT 01 RW 04 dan Jl. Spoorlan RT 01, 02, 03 RW 03 RT 01, 02, 03 RW 03 dan 04 KEMIJEN	550 meter	Diakomodir
30	Peninggian Jalan Pavingisasi	Jalan	Semarang Timur	Jl. Pondok Pati RT 4 RW 7 REJOMULYO	2250 meter	Diakomodir

Sumber:Dokumen Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

Berdasarkan laman resmi pemerintah Kecamatan Mijen, berikut merupakan contoh kasus salah satu penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Mijen pada tanggal 9 Februari 2023, output perencanaan lebih berfokus pada sektor pemberdayaan masyarakat. Melakukan program upaya pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan stunting. Hal ini saling berkaitan. Pembangunan infrastruktur lebih detail melihat keadaan wilayah per cluster. Pada program pengendalian banjir, yang dilakukan pada 2023 dan 2024 akan dilakukan di Kali Plumbon, Jembatan Beringin, tol tanggul laut dan sheet pile bersama Kementerian PUPR. Walaupun dilakukan oleh Kementerian PUPR, namun terdapat bagian-bagian yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang contohnya pembebasan lahan.

Dalam rencana kerja pembangunan daerah, Penanganan banjir merupakan salah satu prioritas di antara lima prioritas pembangunan. Kota Semarang diharapkan bebas dari banjir yang disebabkan oleh pasokan air dari hulu dan banjir yang disebabkan oleh gelombang tinggi. Lalu yang menjadi perhatian Kota Semarang adalah banjir. Oleh karena itu, jika terjadi banjir terparah, Kota Semarang akan terkena dampaknya. Baik banjir dari atas maupun banjir akibat gelombang badai. Berikut Gambar Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:

Gambar 1.3 Tabel Upaya Banjir dan Rob Tahun 2016 – 2020 di Kota Semarang:

**Tabel 2.22.
Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	9,03	4,00	4,00	4,00	1,30	Tercapai
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	50	45	40	40	-
3	Kapasitas/fungsi drainase (volume areal tangkapan)	M3	21.775.506	21.899.585	21.998.968	22.098.351	22.098.351	
4	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	90.209	90.317	90.425	112.443	112.443	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk perbaikan jalan rusak pada APBD Murni 2024. Beberapa jalan sedang dalam renovasi. Ketua DPU Semarang Swart mengatakan, anggaran sebesar Rp 30 miliar dialokasikan untuk pelapisan ulang dan perbaikan kecil jalan berlubang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Musrenbang di Kota Semarang, anggaran yang diberikan kepada kecamatan untuk merealisasikan usulan sarana dan prasarana jalan, saluran dan jembatan lingkungan permukiman dengan kebutuhan pendanaan di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada Musrenbangcam untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025. Untuk konstruksi pekerjaan dibidang fisik yaitu jalan dan saluran menjadi kewenangan perangkat

daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk pekerjaan, konstruksi jalan lebar di atas 2,5 meter, konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas 30 sentimeter.

Menurut pendapat dari Jürgen Habermas, kata “*DELIBERATION*” berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang berarti “nasihat”, “pertimbangan”, atau “nasihat” (Sari 2013). Rainer Forst yang mengatakan pendapat bahwa: “Perencanaan deliberatif artinya sumber legitimasi bukanlah keseluruhan ekspresi kehendak individu atau hukum, melainkan proses dalam mengambil keputusan politik yang selalu transparan untuk musyawarah dan perdebatan” (Wahuni 2015). Hakikatnya, perencanaan musyawarah merupakan respon terhadap tindakan reflektif dan kolaboratif. Untuk mengatasi hal tersebut, konseling bertujuan untuk menciptakan rencana yang dapat diterima untuk mengatur kegiatan para peserta secara optimal. Masing-masing rencana mempengaruhi dan memodifikasi kebutuhan para pesertanya sehingga tujuan dan kepentingan mereka dapat selaras (Forester, 1993).

Menurut F. Budi Hardiman (Sukma 2021), teori demokrasi deliberatif mengkaji perilaku individu dalam suatu warga diaktifkan untuk berperan sebagai warga negara dan bagaimana komunikasi yang terjadi pada tingkat warga negara mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Musyawarah mencakup aspek argumentatif dan informasional. Di sini (rekursif) berarti preferensi, keputusan, dan perspektif yang dianggap tetap di seluruh model dianggap mudah diubah secara musyawarah. Komunikasi non-simbolis, termasuk komunikasi spontan, antar partisipan yang berkompeten. Teori demokrasi deliberatif tidak merekomendasikan revolusi, melainkan reformasi supremasi aturan melalui aktivitas debat publik pada

banyak sekali bidang sosial politik & budaya guna menaikkan partisipasi demokratis masyarakat.

Demokrasi deliberatif mempunyai landasan konstitusional yang kuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi muatannya, demokrasi deliberatif termasuk dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Hal ini erat kaitannya dengan tradisi lokal dan kearifan suku-suku Indonesia. Pancasila menguraikan perwakilan masyarakat dan konsultasi menuju kesepakatan. Kata deliberasi berasal dari bahasa latin *deliberation* yang artinya nasihat, pertimbangan, nasehat.

Demokrasi terjadi secara musyawarah ketika suatu keputusan atau kebijakan publik lolos uji konsultasi publik. Dalam terminologi Habermas, hal ini disebut debat publik. Jürgen Habermas mengatakan demokrasi deliberatif memerlukan hubungan komunikatif antara masyarakat dan negara yang lebih dikenal dengan ruang publik. Terjadi diskusi dialektis yang intensif antara masyarakat dan negara, sehingga menghasilkan keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Pada dasarnya Habermas ingin menciptakan demokrasi yang fokus pada kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas.

Model demokrasi deliberatif yang diprakarsai oleh Habermas bukan wacana baru dalam dialektika demokrasi di Indonesia. Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil di Indonesia, wacana ini dipandang menjamin bagi masa depan demokrasi pasca-reformasi. Adanya ruang publik untuk berdiskusi mengenai kebijakan publik mempunyai kepentingan strategis yang besar bagi perkembangan demokrasi.

Namun dalam situasi Indonesia saat ini, demokrasi deliberatif masih menjadi impian.

Ruang publik yang dimaksud oleh Habermas belum menemukan tempatnya di Indonesia. Sebab, sistem perwakilan yang menjadi ciri suatu demokrasi perwakilan dapat disebut sebagai sistem perwakilan semu karena tidak adanya posisi tawar yang proporsional antara pemilih dan wakilnya. Situasi ini menyulitkan terciptanya ruang publik dalam sistem perwakilan seperti itu. Ruang publik bukan hanya sekedar Rapat Dengar Pendapat, forum publik, atau forum tempat para wakil rakyat menyibukkan diri di waktu istirahat.

Model demokrasi deliberatif menekankan pada proses dan langkah pengambilan keputusan yang fokus pada pertimbangan dan mengeksplorasi permasalahan melalui dialog dan pertukaran gagasan antara aktor dan masyarakat. Bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi perwakilan yang mengedepankan keterwakilan, inti perencanaan deliberatif adalah partisipasi masyarakat. Jika model demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antara pandangan dan partai, maka demokrasi perwakilan adalah persaingan antara gagasan dan partai. Namun bukan tidak mungkin narasi besar permusyawaratan dapat diwujudkan dalam demokrasi perwakilan, dimana proses pengambilan kebijakan oleh wakil rakyat bercirikan partisipasi masyarakat/pemilih melalui proses musyawarah.

Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan yang saat ini diterapkan di Indonesia, melainkan demokrasi yang murni prosedural. Gagasan partisipasi masyarakat yang emansipatoris mengacu pada proses komunikasi dan

pembangunan konsensus dalam forum-forum ruang publik. Peserta didorong untuk melakukan pendekatan deliberatif untuk mencapai kesepakatan bersama dan melakukan proses komunikasi secara terbuka dan adil. Mayoritas dan mayoritas menghormati pendapat minoritas.

Teori Habermas menyajikan gambaran dimana anggota masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam pembentukan opini publik melalui partisipasi mereka dalam berpidato, dan pidato secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem politik melalui sirkulasi kekuatan komunikatif dari pinggiran hingga pusat 'diprogram' atau 'diarahkan' melalui undang-undang dan kebijakan yang 'melayani kepentingan semua' . Dengan cara ini, menurutnya, otonomi politik badan hukum terjamin karena mereka sekaligus dapat menganggap dirinya sebagai penerima hukum dan tunduk pada mereka.

Dalam demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam penelitian yang berjudul Konsep Komunikasi jurgen habermas Dalam Ide Demokrasi deliberatif dan Tindakan Komunikatif pada tahun (2022) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi terdapat tiga prinsip utama. 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait. 2) prinsip reasonableness, artinya dalam mempertimbangkan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain. 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait mempunyai peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya

Berdasarkan artikel Edunews.id yang berjudul Model Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas dan Solusi Praktik Demokrasi Kita yang diredaktur Firman Wijaya Tahun 2020, Elemen kunci dari model demokrasi deliberatif adalah (1) partisipasi warga negara, (2) ketersediaan ruang untuk berpartisipasi dalam proses (ruang publik), dan (3) interaksi antar warga negara dan dengan pengambil keputusan politik. Jika elemen-elemen kunci dari model demokrasi deliberatif dapat diterapkan pada proses pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan produk hukum (dalam hal ini peraturan hukum), khususnya di Indonesia, maka produk kebijakan dan/atau hukum yang dihasilkan akan membaik. Pasti akan memiliki karakter hukum yang responsif.

1. 2 Perumusan Masalah

1. 2. 1. Identifikasi Masalah

1. Untuk melakukan perbaikan jalan harus terlebih dahulu mengatasi masalah banjir
2. Kendala anggaran yang cukup besar untuk menangani infrastruktur jalan di Kota Semarang
3. Pemberdayaan menjadi salah satu prioritas rencana pembangunan tahunan Kota Semarang Tahun 2025
4. Ada usulan yang diajukan Murembang yang dianggap tidak tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat
5. Tantangan pembangunan keputusan dewan selalu politis dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemimpin diganti program tetap jalan. Terdapat perubahan situasi, setelah dimasukkan ke sipd

tidak bisa didiskusikan.

1. 2. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam infrastruktur jalan di Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang?

1. 3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang
- 2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang

1. 4 Manfaat Penelitian

1. 4. 1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang

2. Sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema terkait dengan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di ota Semarang

1. 4. 2. Manfaat Praktis

- 1 Hasil penelitian bisa digunakan untuk bahan referensi bagi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.
- 2 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran Toeritis

1. 5. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Tahun	Teori Metodologi	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Lindell, M. Artshrom, Peter.	Deliberative Walks: Citizen Participation on a Local Level Planning proses (2020)	Kuantitatif	Untuk mendeskripsikan demokrasi dengan menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik terlihat sangat jelas	Demokratif walks dapat memperluas peran warga baik dalam pengambilan keputusan regional maupun lokal. Kita membutuhkan politisi dan pejabat yang berpikiran terbuka dan memahami partisipasi masyarakat.
2.	Lingga, Elisa	Deliberasi Dalam perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Parit rantang, Kecamatan Kamang	Teori demokrasi deliberatif Carson dan Karp (2005:122) yaitu 1. Pengaruh 2. Penyertaan 3. Musyawarah	Untuk mengetahui masyarakat berpartisipasi dalam diskusi mengenai pembangunan infrastruktur	Musrembang Nagari Kunangan diawali dengan konsultasi atau diskusi antara warga dengan kelompok masyarakat di Tingkat Joron dan persiapan pengorganisasian. Musrembang tersebut partisipasi masyarakat sangat rendah yang dilihat dari jumlah peserta Musrenbang 2019 yang diundang sebanyak 259 sedangkan yang

		Baru pada masa Covid 19 (2022)			hadir 120 Orang. Tahun 2020, undangan sebanyak 250 yang hadir hanya 107 orang.
3.	Taufiq, Muhammad Kombaitan, Benediktus Suhirman SOFHANI, Tubagus Furqon	Towards Deliberative Ideals with Informality: A Practical Study of Rural Planning in Indonesia (2021)	Musyawarah menghasilkan keputusan yang didukung oleh semua pemangku kepentingan, mewujudkan cita-cita musyawarah (Habermas, 1990; Mansbridge et al., 2010)	Memberikan pemahaman tentang praktik perencanaan deliberatif di lingkungan pedesaan non-Barat di Desa Pematang Tengah Indonesia	Perencanaan konsultasi harus mempertimbangkan munculnya aspirasi masyarakat melalui forum proses konsultasi informal. Cita-cita musyawarah dalam bidang musyawarah formal tidak diwujudkan melalui dialog formal seperti di negara-negara Barat. Konsultasi intermiten dalam suasana informal untuk memfasilitasi negosiasi dalam konsultasi yang ditargetkan untuk mencapai konsultasi yang optimal.
4.	Rahmat Ravinzar Khairunnisa	(Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten banyuasin, Sumatera Selatan (2023)	Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Miles dan Huberman	Mengukur kecukupan pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Muslembande di Pulau Rimau	Implementasi prinsip demokrasi deliberatif dalam Murembang lemah karena kendala terkait pelaksanaan laporan dan usulan hasil Murembang masih ada. Selain tidak inklusifnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan

				Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.	Mulembang, hal ini juga melanggar prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan optimalisasi peran masyarakat dalam prosesnya.
--	--	--	--	--	--

5.	A'an, Maryani, S., Eka, A.	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. (2021)	Deskriptif Kualitatif	Menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ditinjau dari aspek pengambilan keputusan.	Musrenbang belum maksimal karena jumlah peserta yang sedikit. Kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan desa terkait dengan musyawarah pengambilan keputusan perencanaan.
6.	Fadjar Sukma	Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang	Deskriptif Kualitatif	Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum di Indonesia	keterlibatan secara aktif masyarakat dalam menentukan dan merumuskan sebuah aturan yang akan berlaku baginya juga merupakan vitamin bagi kehidupan demokrasi kita dimana kedaulatan rakyat termanifestasikan secara riil tidak serta

		Demokratis di Indonesia (2021)			merta didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara
7.	Mantysalo, M. Westin, M. Mattila, H.	Public Planner- a Deliberative Aurorithy (2023)	Berdasarkan pemikiran Haugaard tentang Kekuatan Pemikiran Ulang, Dialektika Norma Publik dan Keterlibatan Performatif karya Sallet, pergantian “sistem” dalam teori demokrasi deliberatif, dan karya Warren mengenai otoritas	Mendeskripsikan teori perencanaan publik (musyawarah) dan praktiknya	Yang dibutuhkan adalah teori perencanaan yang memungkinkan otoritas perencanaan publik mempertimbangkan potensi perubahan.
8	Sampe Stefanus, Horopue Caroline Betzy, Kumayas Neni	Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di	Kualitatif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas	Mengetahui penerapan perencanaan deliberatif dalam perumusan peraturan desa di Desa Pintareng Kabupaten Tenggara	Penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Pintaren Kabupaten Tabkan Selatan Tenggara telah dilaksanakan pada tahun ini, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Sangat sedikit masyarakat yang terlibat

		Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Sulawesi Tenggara (2023)	yang mendasar untuk pengambilan keputusan, yaitu 1. nilai kebersamaan 2. nilai kebebasan berpendapat 3. nilai melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.		dalam proses pembuatan regulasi desa.
9	Muttaqin, M. E Ramdan, D	Konsep Komunikasi Jurgan Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif (2023)	Kualitatif Teori komunikasi Habermas yang terdiri dari 1) komunikasi dasar 2) komunikasi politik 3) sistem pers	Untuk mendeskripsikan wujud demokrasi deliberatif dimana partisipasi masyarakat dianggap sebagai hak untuk berkomunikasi.	Habermas menghindari komunikasi yang mengeksploitasi orang dan merekomendasikan jenis komunikasi tertentu. Akibatnya, keselarasan ini menghasilkan kesetaraan, hak asasi manusia yang tinggi, dan komunikasi transformasional.

			4) kompetensi komunikasi.		
10	Priono, Agustus	Dinamika Demokrasi Deliberatif Melalui Musyawarah Kelurahan Musikal di Kelurahan Patuk, Kapanewon, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (2023)	Kualitatif Eksploratif	untuk mengetahui proses dari pelaksanaan demokrasi deliberatif yang ada di musyawarah di tingkat Rt sampai kelurahan	Pelaksanaan aktivitas musyawarah di setiap tingkat masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Misalnya, dalam musyawarah di tingkat kelurahan, orang-orang yang terlibat telah mewakili rakyat di ruang yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Namun, aktualisasi diri Bamuskal sebagai perwakilan rakyat selama musyawarah tidak dapat mewakili aspirasi rakyat karena mereka hanya terlibat sebagai penyelenggara.
11	Nuryati Antoro, Aji F S	Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Paya Benua, Negeri Laskar Pelangi (2024)	Kualitatif deskriptif	Untuk menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat Desa Payabenua dalam proses pengambilan keputusan administratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut.	Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung, Penilaian kebutuhan, konsultasi konsensus, dan partisipasi kelompok kerja meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Pemerintah desa harus membuat website resmi pemerintah desa dan secara teratur mengadakan pertemuan dan kegiatan tatap muka.

12	Fahira, Rana Salam, Rahmat	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (2023)	Kualitatif deskriptif Teori partisipasi masyarakat menurut Marschall 1. Adanya forum 2. Adanya akses masyarakat 3. Pengambilan keputusan	Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan sawah kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	Ada forum, tetapi tidak semua masyarakat dapat hadir pada waktu musrenbang. Perencanaan dan pemberdayaan tahap pertama hanya formalitas, proses pengambilan keputusan organisasi dan pemerintah.
13	Raharjo, Riyanto P: Suminar, S Winarti, S E Saptyaningtyas, H	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Formalistik di Desa Guwosari dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul	Kualitatif deskriptif	Untuk mengkaji penyelenggaraan Musrenbangdes yang dalam banyak praktik hanya bersifat formalistik dan faktor penyebabnya.	Beberapa masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan tidak memahami apa yang dibicarakan.

		(2021)			
14	Rami, Atiqa S Markhamah, S	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto Melalui Program Sosialisasi (2020)	Kualitatif Deskriptif	Untuk menguraikan partisipasi masyarakat di Desa Bugel Kecamatan Polokarto	Di Desa Pintar Kabupaten Tabukan Selatan Tenggara, demokrasi deliberatif telah diterapkan pada tahun, tetapi belum digunakan sepenuhnya. Sangat sedikit masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan regulasi desa.
15	Samaun, R Bakri B Mediansyah, A R	Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara	Kualitatif	Untuk mengetahui upaya pemerintah Gorontalo dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Gorontalo dan faktor pendorong dan penghambat	Pemerintah desa melakukan banyak hal untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh sikap gotong royong dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terkait acuan teori yang saya gunakan. Saya menggunakan teori demokrasi deliberatif menurut jurgen habermas yaitu prinsip deliberasi, prinsip reasonableness, dan prinsip kebebasan. Sedangkan penelitian yang lain menggunakan teori demokrasi deliberatif carson dan Karpis, jurgen dan Miles. teori pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat. Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada hasil musrenbang. Perbedaan lainnya terkait dengan lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada proses Musrenbang, partisipasi masyarakat terhadap Musrenbang dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan implementasi hasil Musrenbang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada proses perencanaan, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana proses pra Musrenbang, implementasi hasil Musrenbang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi Musrenbang dan peran pengawasan masyarakat dalam mengawal keberjalanan program perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian juga mengungkapkan antara gap dan harapan hasil akhir Musrenbang yang mengindikasikan kendala dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan publik. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan akar penyebab dari permasalahan secara lebih mendalam dengan menganalisis pedoman pelaksanaan Musrenbang, aturan mengenai Musrenbang, prosedur Musrenbang, peran stakeholder dalam Musrenbang.

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan skala daerah (kecamatan) agar penelitian lebih berfokus pada suatu daerah. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang demokrasi deliberatif dalam Musrenbang, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kritis bagaimana musrenbang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan faktor pendorong dan penghambat dalam Musrenbang.

1. 5. 2. Administrasi Publik

1. 5. 2. 1. Pengertian Administrasi Publik

Kata “administrasi publik” berasal dari bahasa latin “*ad*” dan “*ministrate*) yang berarti pemberian bantuan, jika dalam bahasa Inggris “*administration*” mengandung makna “*to serve*”. Administrasi publik sebagai upaya melayani sebaik-baiknya. Menurut Soewarno handyaningrat (1988:20, administrasi berasal dari bahasa Belanda *Administratie* yang berarti kegiatan surat-menyurat dan catat-mencatat. Administrasi adalah kegiatan pembukuan dan pengarsipan surat-surat serta hal lain untuk menyediakan dan mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan kembali.

Menurut Chandle dan Plano (2008 : 3) administrasi publik adalah Proses dimana asal daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan buat memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (manage) keputusan-keputusan pada kebijakan publik.. Menurut Chandler dan Plano (1988:3) dalam (*The Public Administration Dictionary*) yang menepis makna administrasi hanya sebatas kegiatan ketatausahaan dengan mendefinisikan

ulang sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan pendapat Sondang P. Siagin (2004) administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. 5. 2. 2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bidang studi dan praktik yang berkaitan dengan manajemen dan implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik oleh pemerintah atau sektor publik. Administrasi publik mencakup proses, kegiatan, dan prinsip pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan publik, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi sumber daya publik, dan bagaimana sumber daya publik digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dan kepentingan.

Ruang lingkup administrasi publik mencakup:

1. Penyusunan Kebijakan Publik

Administrasi dalam penyusunan kebijakan melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak langkah dan proses.

2. Pelaksanaan Program dan Proyek Pemerintah

Pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan pemerintah adalah komponen penting dalam pelaksanaan program dan proyek pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat;

alokasi sumber daya; pengaturan anggaran; manajemen pelaksanaan; dan evaluasi program dan proyek.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam manajemen SDM, administrasi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen SDM dalam suatu organisasi, termasuk administrasi. Tujuan pengelolaan SDM adalah untuk membuat tempat kerja menjadi tempat yang sehat, produktif, dan efisien.

4. Pengaturan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem transportasi, telekomunikasi, diskusi bersih, dan energi adalah bagian dari infrastruktur publik.

5. Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ada banyak aspek yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

6. Pengaturan Keuangan dan Anggaran

7. Perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan keuangan perusahaan adalah semua bagian dari pengaturan keuangan dan anggaran.

8. Hubungan Antar Lembaga

Untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, dan kohesi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik, hubungan

antarlembaga meliputi interaksi, kerja sama, dan koordinasi antar lembaga negara dan administrasi publik masing-masing negara.

1. 5. 3. Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma Old Public Administration

Wilson (1887) berpendapat bahwa menegakkan suatu konstitusi lebih sulit daripada menyusunnya sehingga memerlukan peningkatan sumber daya intelektual dalam penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Pengembangan administrasi pemerintahan diperlukan. Kepemimpinan administrasi negara diperlukan untuk dan pembaharuan administrasi publik. Oleh karena itu, diperlukan ilmu pengetahuan yang bisa mengarah pada reformasi birokrasi sehingga menghasilkan pejabat yang profesional dan tidak partisipatif

Adanya dikotomi politik/administratif. Dikotomi ini secara efektif melindungi para profesional muda. Pada tahun 1929, oposisi biner administratif hanya membawa efisiensi pada implementasi langkah-langkah yang diambil oleh politisi terpilih. Mereka membayar semua biayanya, tanpa perang, politik atau administrasi. Namun, dikotomi politik atau administrasi tidak mengakui bahwa administrator sering berpolitik. Hal ini menyebabkan para pendiri gagasan ini menjaga jarak meskipun para administrator dan politisi melakukan hal yang berbeda. Mereka tetap perlu bekerja sama demi kebaikan yang lebih besar.

2. Paradigma *New Publik Management*

New Public Management (NPM) muncul dari perbedaan status PNS pada golongan kedua. Mereka mencari alternatif lain dan menemukan suatu pengendalian yang disebut pengendalian administratif atau pengendalian umum. Adanya gagasan ini ditandai dengan berdirinya *School of Business di Cornell University* pada tahun 1948 sebagai departemen akademik pertama. Dalam hal pelayanan publik, pemerintah tradisional dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan pelayanan publik. Dari perspektif administrasi publik klasik, publik mengacu pada badan dan lembaga pemerintah. Namun, paradigma manajemen menimbulkan pertanyaan mengenai definisi publik

Menurut Rosenbloom & Kravchuck (2005), beberapa keuntungan dari penerapan NPM adalah bahwa pembangunan birokrasi selalu memperhatikan aspek pasar, mengutamakan persaingan dan kontrak untuk mencapai hasil, lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan dan lebih responsif daripada operasional itu sendiri, deregulasi diperlukan, dan pelaksana diberi wewenang untuk melakukannya. Ini akan menjadi lebih efektif. Selain itu, budaya organisasi yang digambarkan oleh NPM adalah budaya yang fleksibel, inovatif, kewirausahaan, dan berfokus pada hasil daripada prinsip, proses, dan hasil.

3. Paradigma *New Public Service*

Kelemahan dari *OPA* dan *NPM* ditutupi oleh perspektif lain yaitu *New Public Service*. Teori ini beranggapan bahwa birokrasi merupakan

instrumen rakyat dan harus mematuhi suara rakyat sepanjang wajar, sah, dan konstitusional. Filosofi NPS Denhardt menekankan bahwa pemerintah tidak boleh dijalankan seperti korporasi tetapi harus melayani rakyatnya secara demokratis, adil, tidak memihak, tidak diskriminatif, jujur, dan bertanggungjawab. Disini pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, menjamin hak-hak rakyat, dan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2016).

Denhardt dan Denhardt (2003) kemudian menyampaikan sejumlah prinsip NPS seperti

1. *Serve citizens, not customer*
2. *See the open intrigued*
3. *Esteem citizenship over business*
4. *Think deliberately, act fairly*
5. *Recognize the responsibility isn't straightforward*
6. *Serve instead of control*
7. *Value people not just productivity*

4. Good Governance

Penerapan konsep administration Hal ini diharapkan dapat mengalihkan perhatian administrasi publik pada kepentingan masyarakat umum, terutama dengan melibatkan mereka dalam proses pemenuhan kepentingan publik. Konsep tata kelola, yang dikemukakan oleh Stoker (1998, 17-18), mengacu pada gaya pemerintahan yang berkembang di mana perbedaan antara sektor publik dan swasta menjadi tidak jelas (Ewalt, 2001,

8). Ketidakjelasan ini sesuai dengan kebutuhan negara untuk menerapkan mekanisme politik yang lebih luas. Negara juga mengakui pentingnya memasukkan masalah yang berkaitan dengan empati dan perasaan publik untuk menciptakan peluang untuk mobilisasi sosial dan politik (Stoker, 2004: 10). Oleh karena itu, partisipasi yang dicapai melalui pembentukan jaringan antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan legitimasi politik (Stoker, 2004: 10).

Konsep pemerintahan kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang baik dengan membedakan bagaimana ia dijalankan dari yang baik dan yang buruk (Prasojo, 2003, 9). Menurut Plumptre dan Graham (1999,12) good governance adalah Model pemerintahan yang menghasilkan hasil ekonomi dan sosial yang diinginkan masyarakat. IMF dan Bank Dunia percaya bahwa tata kelola yang baik adalah cara untuk menegakkan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga berarti memberantas korupsi, yang dapat dicapai melalui transparansi dan pembagian informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, *good governance* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Akuntabel artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawaban
2. Transparan berarti masyarakat harus mendapatkan informasi yang memadai tentang prosesnya.
3. Responsif artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder

4. Setara dan inklusif artinya semua anggota masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi.
5. Efektif dan efisien berarti kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara terbaik.
6. Mengikuti aturan hukum, artinya kerangka hukum yang adil dan ditegakkan diperlukan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
7. Partisipatif, yang berarti proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus memungkinkan banyak pihak berpartisipasi.
8. Berorientasi pada konsensus (kesepakatan).

1. 5. 4. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebuah program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu disebut kebijakan publik, menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 17). Menurut Thoma Dye (2011, 1), kebijakan publik mendefinisikan semua tindakan pemerintah, motivasi mereka, dan konsekuensi dari hidup berdampingan. (public policy is “*Whatever government to choose to do or not to do. Public policy is what government do, whey they do it, and what difference it make*”). Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah yang tidak dilakukan ketika menghadapi masalah publik. Thomas Dye memberikan dua definisi kebijakan publik: (1) kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah dan bukan organisasi swasta, dan (2) kebijakan publik

berkaitan dengan keputusan yang dapat dibuat oleh lembaga pemerintah. Kebijakan publik bukanlah tentang mempertahankan program lama atau membuat program baru.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Pada dasarnya, tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan ketertiban dalam domain manajemen sistem publik. Kebijakan publik biasanya memiliki tujuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bahkan hukum. Dalam bidang politik, tujuan kebijakan publik adalah untuk mendistribusikan nilai dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat. Di bidang sosial, tujuan kebijakan publik adalah untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi konflik dan keresahan sosial, dan meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan pendapat (Affrian, 2012).

Prinsip-prinsip kebijakan ini digunakan sebagai dasar dari segala urusan pemerintahan untuk menyusun dan mencapai keefektifan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuan kebijakan publik dapat dibagi menjadi jenis berikut:

1. *Resources* atau sumber daya

Kebijakan publik yang bertujuan untuk menyerap dan mendistribusikan sumber daya negara, seperti kebijakan otonomi daerah, yang memberikan daerah kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya.

2. Kebijakan regulatif dan deregulatif

Kebijakan yang bersifat regulatif berfungsi untuk mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, pengadaan barang dan jasa, dan hak asasi

manusia, sementara kebijakan yang bersifat deregulatif berfungsi untuk membebaskan, seperti kebijakan privatisasi dan penghapusan tarif.

3. Dinamisme dan stabilitas

Kebijakan dinamis adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memobilisasi sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan yang diinginkan, seperti kebijakan desentralisasi atau stabilitas. Mereka juga dimaksudkan untuk mencegah perubahan yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, seperti kebijakan keamanan nasional dan penetapan suku bunga.

4. Penguatan negara dan pasar

Kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar daripada peran masyarakat, seperti kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai aktor utama dan bukan masyarakat, dibandingkan dengan kebijakan yang mendorong peran publik atau mekanisme pasar lebih besar daripada peran negara. Misalnya, kebijakan privatisasi perusahaan publik dan kebijakan perseroan terbatas (PT) adalah contoh kebijakan yang mendorong peran publik atau pasar lebih besar daripada peran negara.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mencakup empat metode penelitian proses kebijakan, hasil penelitian kebijakan, dan wawasan yang dihasilkan oleh penelitian yang membantu menjawab kebutuhan intelijen dan kerja sama saat ini. Tujuan politik dan realisasinya berhubungan dengan hasil kegiatan negara dalam pelaksanaan tindakan politik. Permasalahan kebijakan harus diatasi dan diselesaikan sebelum kebijakan dapat diterapkan.

Keempat komponen ini berfungsi sebagai sumber masalah dan merupakan syarat untuk keberhasilan proses penerapan kebijakan. merupakan struktur organisasi yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan proses kerja birokrasi. Ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, keempat elemen tersebut harus ada.

Faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik

1. Faktor sistem politik

Tata pemerintahan dan administrasi sistem politik adalah faktor terhadap. Dengan bantuan publik atau masyarakat, pemerintah dapat membuat kebijakan, dan kinerjanya juga dinilai.

2. Faktor sistem ekonomi

Pasar dan perusahaan biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan bertransaksi dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Faktor nilai-nilai sosial budaya

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan lebih berfokus pada populasi umum atau warga negara.

1. 5. 5. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas suatu masyarakat, yang memerlukan persiapan yang cermat. Rencana ini harus dapat mencakup kapan, di mana, dan bagaimana pembangunan harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Ustanir & Abadi, 2017; Yimaz Bakir dkk., 2018). Perencanaan pembangunan, menurut Tjokroamidjojo (1984), didefinisikan sebagai manajemen penggunaan sumber daya pembangunan, termasuk sumber daya ekonomi, untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efisien dan efektif, dengan dasar kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah mengambil alternatif terbaik dengan sumber daya yang cukup (Mustanir, Ahmad). Sehubungan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan, pembangunan merupakan proses yang melibatkan perubahan dan upaya tambahan (Todaro, 2000). Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, yang memainkan peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, kelompok sasaran, pemerintah, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan anggaran, dan masyarakat lokal, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kebijakan, harus memprioritaskan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kebijakan publik.

Indikator perencanaan pembangunan menurut Sijafrisal (Hasim & Abd Rohman, 2017) dalam (Mustanir & yasin, 2018) adalah sebagai berikut

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; ini adalah keterpaduan antara pelaku pembangunan dalam institusi pemerintahan dan swasta serta masyarakat umum.
2. Menjamin bahwa area akan terintegrasi, sinkronisasi, dan bersinergi sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan keterkaitan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, atau bagaimana memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
5. Salah satu tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara adil, efisien, dan efektif.

1. 5. 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tujuan Musrenbang perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai: 1. Pencapaian visi dan misi daerah, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintahan, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Salah satu jenis perencanaan dan penganggaran yang dikenal sebagai musrenbang menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up dengan fokus pada partisipasi (Yunas, Zhiru 2017). Menurut Norton dan Elson

(2002), penerapan pendekatan top-down dalam penganggaran dan perencanaan tidak boleh membatasi tanggung jawab perencana dan masyarakat.

Oleh karena itu, musrenbang dilakukan untuk mencapai kesepakatan, komitmen, dan kesepakatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan tentang prioritas pembangunan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, pendekatan top-down dan partisipatif diterapkan melalui berbagai musrenbang yang dimulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sebelum mencapai tingkat nasional dan provinsi.

1. 5. 7. Demokrasi Deliberatif

Jürgen Habermas berpendapat bahwa istilah "DELIBERATION" berasal dari kata Latin *deliberatio*, yang berarti "nasihat", "pertimbangan", atau "nasihat" (Sari 2013). "Demokrasi deliberatif artinya sumber legitimasi bukanlah keseluruhan ekspresi kehendak individu atau hukum, melainkan proses pengambilan keputusan politik yang selalu terbuka untuk musyawarah dan perdebatan," kata Rainer Forst, salah satu kritikus Habermas (Wahuni 2015). Sebenarnya, perencanaan musyawarah adalah tanggapan terhadap tindakan berfikir dan bekerja sama. Untuk mengatasi hal ini, konseling bertujuan untuk membuat rencana yang dapat diterima untuk mengatur kegiatan peserta dengan cara yang paling efektif. Kebutuhan peserta dipengaruhi dan diubah oleh masing-masing rencana sehingga tujuan dan kepentingan mereka dapat disesuaikan (Forester, 1993).

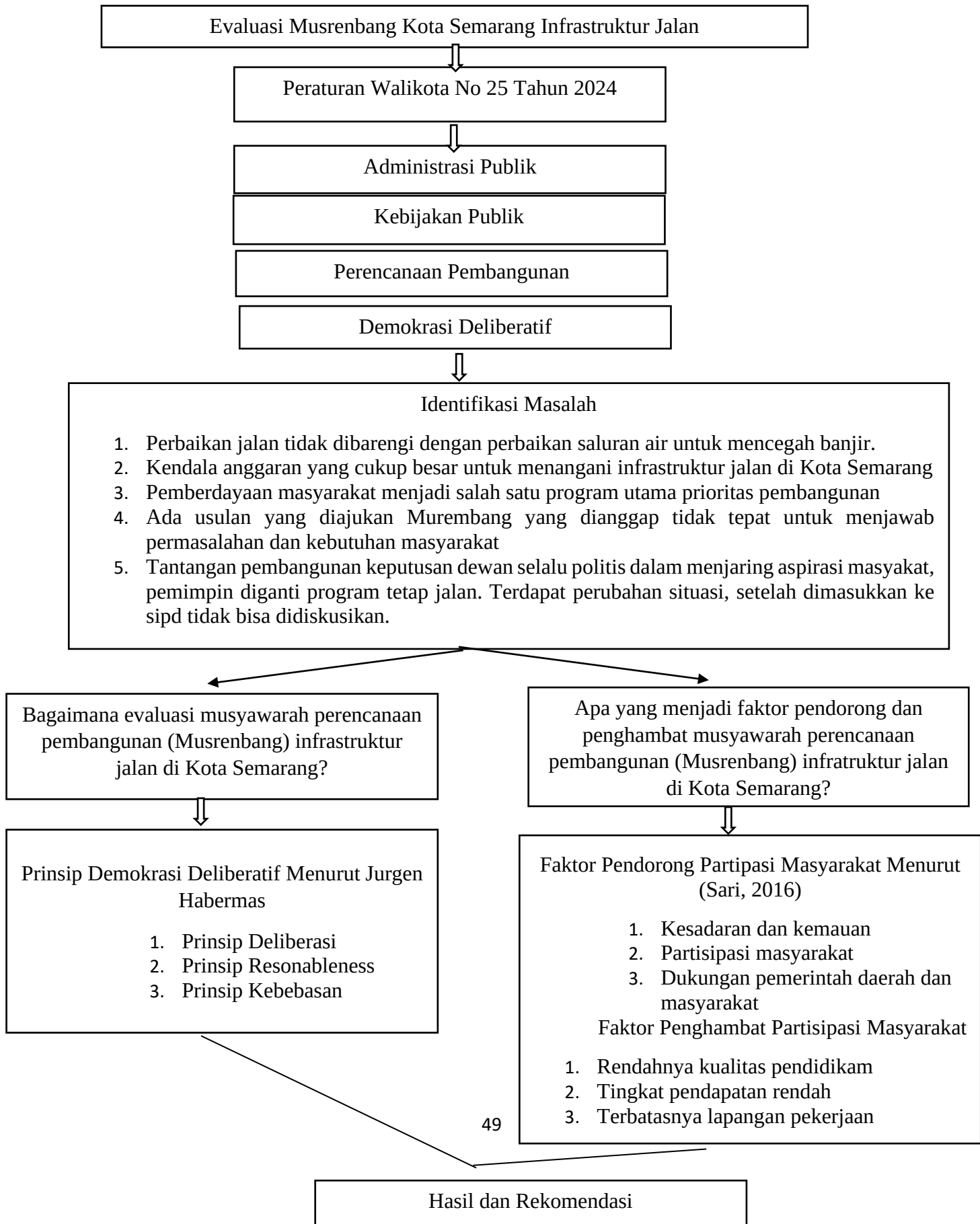
Teori demokrasi deliberatif mempelajari bagaimana orang dalam suatu masyarakat berkomunikasi sebagai warga negara dan bagaimana komunikasi pada tingkat warga negara mempengaruhi pengambilan keputusan (F. Budi Hardiman,

Sukma 2021). Aspek argumentatif dan informasional diperlukan dalam musyawarah. Di sini, "rekursif" berarti bahwa keputusan, preferensi, dan perspektif yang dianggap konstan selama model dapat diubah secara musyawarah. Komunikasi non-simbolis, yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan, antar peserta yang berkompeten Teori demokrasi deliberatif tidak mendorong revolusi; mereka mendorong perubahan supremasi hukum melalui debat publik di berbagai bidang budaya dan sosial untuk meningkatkan partisipasi demokratis masyarakat.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi deliberatif memiliki landasan konstitusional yang kuat. Menurut muatannya, sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menggambarkan demokrasi deliberatif. Ide ini terkait erat dengan adat istiadat lokal dan kearifan suku-suku Indonesia. Pancasila menetapkan konsultasi dan perwakilan masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Dari bahasa Latin, *deliberation* berarti nasihat, pertimbangan, atau nasehat.

Ketika kebijakan publik lulus uji konsultasi publik, demokrasi terjadi. Menurut Habermas, ini disebut diskusi publik. Menurut Jürgen Habermas, demokrasi deliberatif memerlukan hubungan komunikatif antara ruang publik dan masyarakat. Dalam proses membuat keputusan, masyarakat dan negara berbicara secara dialektis satu sama lain. Pada dasarnya, Habermas ingin membangun demokrasi yang berpusat pada kualitas daripada kuantitas.

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Demokrasi Deliberatif

Operasionalisasi konsep menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur evaluasi kebijakan

Teori demokrasi deliberatif membuka peluang bagi masyarakat, LSM, akademisi, pemerintah dan stakeholder terkait untuk berkomunikasi dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan yang biasanya proses tersebut disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Prinsip dalam Teori Deliberasi Demokratif menurut Jorgen Habermas dalam penelitian yang berjudul Konsep Komunikasi jorgen habermas Dalam Ide Demokrasi deliberatif dan Tindakan Komunikatif(2022) yang dimuat Jurnal Ilmu Komunikasi yaitu prinsip deliberasi, prinsip reasonableness, dan prinsip kebebasan. Operasional konsep menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur variabel. Kriteria yang digunakan untuk mengukur evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan

Dalam demokrasi deliberatif Jorgen Habermas terdapat tiga prinsip utama.

1) Prinsip deliberasi,

Berkaitan dengan pertimbangan yang dilakukan oleh semua pihak sebelum pengambilan keputusan.

2) Prinsip reasonableness,

Berkaitan dengan pertimbangan bersama dan kesediaan untuk memahami pihak lain.

3) Prinsip kebebasan

Berkaitan dengan peluang dan kebebasan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasan

Dalam teori ini menekankan pada proses dan partisipasi antar stakeholder serta cara meraihnya.

Penelitian ini yang menjadi fenomena adalah

1. Partisipasi masyarakat dan stakeholder beserta narasumber
2. Ketersediaan ruang dalam proses musyawarah
3. Komunikasi antar warga dan pembentuk kebijakan
4. Banyaknya usulan yang masuk
5. Kesesuaian usulan dengan program yang berjalan.

Kerangka Teori

1. Kerangka Teori Prinsip Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama

- 1) Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak terkait.
- 2) Prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain
- 3) Prinsip kebebasan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan dan gagasannya (Jurgen Habermas dalam Muttaqien dan Deden, Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif : 2023)

Esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberatif -yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final. (Habermas dalam Paulus dan Otto, Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas : 2022)

1. Prinsip Deliberasi

Diskusi Kekuasaan

Jurgen Habermas berpandangan bahwa proses demokratisasi kekuasaan hanya mungkin terjadi jika jalur komunikasi antara warga dan pengambil keputusan politik menjadi jalur aliran kekuasaan. (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)

Jaminan Kesempatan

No	Tokoh	Pendapat
1.	Habermas (1995)	Paradigma prosedural berpijak pada gambaran tentang masyarakat bukan saja sebagai lokus prosedur produksi, melainkan juga tempat proses komunikasi. Untuk dapat memenuhi perannya sebagai jaminan integrasi sosial, hukum harus legitim.
2.	Rousseau dalam Jürgen Habermas (1995) (Rousseau : Jürgen Habermas, Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine politische Schriften VIII, Frankfurt am Main: Suhrka Verlag, 1995, hlm. 77)	Hak-hak dasar yang dikonstruksikan di atas memang bersifat konstitutif bagi setiap asosiasi subjek-subjek hukum yang bebas dan setara. Namun keberadaan hak-hak dasar tersebut membutuhkan kekuasaan negara yang dapat memberikan jaminan kepastian jangka panjang.
3.	(Jürgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking The Digital Public Sphere, With Habermas and Beyond Habermas : 2024)	Argumentasi atau deliberasi dalam demokrasi substantif selalu memiliki titik pijak penilaian-penilaian rasional secara empiris dan normatif. Artinya, deliberasi selalu merujuk pada pernyataan deskriptif tentang apa yang riil secara empiris dan proposisi preskriptif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, argumentasi bukan sekedar ekspresi permainan akrobat kepentingan-kepentingan (ekonomi atau identitas sektarian), melainkan berisi tentang proposisi-proposisi kebenaran.

Kesempatan Yang Sama

Deliberasi publik adalah pertukaran argumentasi untuk mendukung keyakinan politik. Dengan demikian keyakinan politik tidak saja sekedar preferensi subjektif, tapi berpijak pada fakta politis yang objektif baik secara empiris maupun normatif. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut lumrah dan tidak

bereskalasi menjadi tindakan kekerasan dan perang, sebab demokrasi berpijak pada prinsip kooperasi dan penentuan diri kolektif setiap individu yang bebas dan setara (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas* : 2024)

Sumber Daya

Komunikasi

Habermas menekankan pentingnya afinitas identitas kolektif sebuah bangsa pada prinsip-prinsip universal negara hukum dan demokrasi. Bangsa modern berbasis kewargaan tidak menemukan dan merumuskan identitasnya di dalam kesamaan etnis-kultural, melainkan lewat praksis kewargaan yang secara aktif mengartikulasikan hak-hak komunikasi dan partisipasi publik. (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas* : 2024)

2. Prinsip Reasonableness

Keadilan

No	Tokoh	Pendapat
1.	(Jurgen Habermas dalam Paulus dan Otto, Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas dalam Jurnal Ledalero Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif ledalero : 2022)	Esensi demokrasi dari perspektif demokrasi deliberatif -yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi dan pluralisme- merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final
2.	(Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)	Peran sentral ruang publik. Ruang publik adalah jaringan komunikasi atau sirkulasi substansi dan opini. Komunikasi opini tersebut mengalami proses filterisasi dan pemadatan sehingga terbentuklah opini publik yang berisikan tema-tema tertentu. Pada tempat pertama ruang publik diartikan sebagai jaringan komunikasi di mana terjadi pertukaran pandangan dan opini. Perlu ditekankan bahwa hanya opini yang memenuhi kriteria tertentu dapat menjadi opini publik yang sesungguhnya.

Kepatuhan

Habermasian berpijak pada basis argumentasi bahwa otonomi politik merupakan tujuan dalam dirinya yang tidak dapat dicapai dengan cara merealisasikan interesse privat masing-masing individu, melainkan lewat partisipasi politik semua dalam sebuah praksis intersubjektif. Artinya, tidak seorang dapat

hidup bebas dengan cara mengorbankan yang lain, sebab kebebasan seorang individu terhubung dengan kebebasan individu-individu lain tidak saja dalam pengertian kebebasan negatif liberal (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, *Deliberation in Digital Environments and Toleration: Rethinking the Digital Public Sphere, with Habermas and Beyond Habermas* : 2024)

3. Prinsip Kebebasan

1. Komunikasi

No	Tokoh	Pendapat
1.	(Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, <i>Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas</i> : 2024)	Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga untuk tur menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan (Jurgen Habermas, 1996) <i>Die Einbeziehung des anderen</i> . Frankfurt am Main: Suhrkamp
2.	(Jurgen Habermas dalam Paulus dan Otto, <i>Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas dalam Jurnal Ledalero Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif ledalero</i> : 2022)	Buku <i>Faktizität und Geltung</i> mengemukakan tiga kategori hak yang mutlak perlu bagi seorang pribadi hukum dan satu kelompok hak atas partisipasi politik. Tiga kategori hak dimaksud adalah: (1) Hak atas kebebasan subjektif yang setara dan seluas-luasnya; (2) Hak atas status keanggotaan yang bebas pada sebuah asosiasi hukum; (3) Hak atas perlindungan hukum secara individual. Ketiga kelompok hak ini tergolong ke dalam kategori otonomi privat. Kemudian terdapat juga (4) hak-hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini publik dan kehendak.

3. Media Masyarakat

No	Tokoh	Pendapat
1.	Paulus dan Otto dalam Habermas : Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas (2022)	Untuk menjamin kualitas argumentasi tersebut ruang publik politik sangat dibutuhkan. Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.
2.	(Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)	Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.

4. Akses Informasi

Bergesernya ruang deliberasi publik dari media massa main stream ke jaringan media sosial dan media online dengan kualitas yang mencemaskan menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan kualitas demokrasi. Arus informasi dan data sering bergerak sesuai selera dan preferensi pengguna yang tak jarang menutup diri terhadap informasi dan pandangan yang lebih terpercaya dan berkualitas. (Jurgen Habermas dalam Andrea Carriquiry, Deliberation in digital environments and toleration: rethinking the digital public sphere, with Habermas and beyond Habermas : 2024)

Tabel 1. 2 Operasonalisasi Konsep

No	Faktor	Indikator	Gejala	Sub gejala
1	Demokrasi deliberatif	Prinsip deliberasi	Diskusi kekuasaan	Jaminan kesempatan
				Kesempatan yang sama
				Kebebasan berargumen
			Sumber daya	Komunikasi
				Sarana komunikasi
				Akses informasi tidak terbatas
				Tujuan
		Prinsip Reasonableness	Kepatuhan	Konformitas
				Penerimaan
				Ketaatan
			Keadilan	Hal individu
				Peluang yang sama
				Ruang Publik
		Prinsip Kebebasan	Komunikasi	Ketenangan komunikasi
				Membuat usulan
				Pertukaran hak dan kewajiban

			Media Masyarakat	Media presentasi masyarakat
				Akses informasi
				Sarana pendidikan

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Kerangka Teori

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227)

1. Kesempatan

Menurut Slamet, (Nurbaiti, 2017:227), Kesempatan yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi salah satunya ialah melalui peran pemerintah. Wujudnya yaitu dengan kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan.

2. Kemauan

Menurut Slamet (Nurbaiti, 2017:227), kemauan yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi

3. Kemampuan

Kemampuan menurut Slamet (Nurbaiti, 2017 : 227) adalah kemampuan untuk menemukannya dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). Kemampuan dari masyarakat menentukan lancarnya proses kegiatan untuk mencapai tujuan.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Menurut

1. Kesempatan
2. Kemauan
3. Kemampuan

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Demografi
2. Ekonomi

Tabel 1. 3 Opreasionalisasi Konsep Faktor Pendorong dan Penghambat

No	Indikator	Gejala	Sub gejala
1	Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat	Kesempatan	Pengambilan keputusan
			Perencanaan
			Pelaksanaan
			Monitoring dan evaluasi
		Kemauan	Minat
			Sikap
		Kemampuan	Kesempatan
			Peluang
2	Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	Demografi	Usia
			Pendidikan
		Ekonomi	Penghasilan
			Pekerjaan

1.8 Argumen Penelitian

1. Menurut Stephen Toulmin, argumentasi adalah jenis logika yang sistematis dengan dasar yang kuat. Ia menyarankan model argumentasi yang terdiri dari enam komponen: klaim, data, backing, waran, rebuttal, dan qualifier. Klaim adalah pernyataan yang ingin dibuktikan, data adalah bukti yang mendukungnya, waran menunjukkan hubungan antara klaim dan data, dan rebuttal adalah penolakan terhadap klaim. Kualifikasi adalah batasan atau syarat dari klaim.
2. Dalam melakukan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dibutuhkan data yang relevan dan harus memperhatikan proses musrenbang. Mengingat banyak daerah yang telah dilakukan musrenbang tetapi hasil dari usulan musrenbang tersebut belum bisa diwujudkan oleh pemerintah. Namun, dibalik itu masih banyak ruang publik masyarakat yang dibatasi dengan regulasi ataupun legitimasi yang ada sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapatan mereka terkait pembangunan daerah terutama infrastruktur jalan.
3. Bappeda Kota Semarang bergerak sebagai instansi pemerintah daerah dalam menghimpun perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Bappeda juga sebagai institusi pelaksana yang menaungi musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Semarang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Hal ini sebagaimana termaksud dalam Peraturan

Walikota Semarang no 25 Tahun 2024 tentang pedoman Musyawarah Perencanaan pembangunan.

4. Sejalan dengan regulasi ini, peneliti memilih instansi tersebut sebagai instansi yang menjadi acuan dasar untuk melihat realita di lapangan musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang. Diharapkan dengan adanya evaluasi , musrenbang pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kualitas dan implementasi dari usulan yang telah dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
5. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang sebelumnya telah dilakukan dimana evaluasi dan faktor pendorong faktor penghambat musrenbang tidak diperhitungkan dengan berlandaskan teori. Peneliti ingin mengetahui secara lebih komprehensif evaluasi musrenbang beserta faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi evaluasi musrenbang.

1.9 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif, menurut Koentjaraningrat (1993: 89), digunakan untuk memberikan gambaran mendalam tentang keadaan dan gejala individu atau kelompok tertentu. Suharsimi Arikunto (2013: 3) menguraikan definisi penelitian deskriptif, yang berarti penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya sebelum dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan dan direncanakan kedepannya. Penelitian

ini untuk mendeskripsikan. Penelitian ini mengidentifikasi tentang dari tahapan proses musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang dengan stakeholder terkait dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat.

1.10 Situs Penelitian

Lokasi penelitian, menurut Sugiyono (2017: 101), adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian harus dipilih dengan teliti dan sesuai dengan tujuan, latar belakang, dan masalah penelitian. Situs penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan penelitian dan pengamatan ke berjalannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Peneliti memilih Kota Semarang karena dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut masih terdapat sejumlah permasalahan.

1.11 Subjek Penelitian

Subjek penelitian Suharsimi Arikunto (1989) membatasi subjek penelitian sebagai objek, objek, atau individu di mana data untuk variabel penelitian disimpan. Subjek penelitian adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:300). Peneliti mempertimbangkan tertentu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti dengan informan sebagai narasumber sehingga

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54). Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu di bidangnya. Selain itu, digunakan teknik snowball sampling untuk mengungkapkan aspek atau hal yang lebih spesifik di lapangan, melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu

1. Bappeda Jawa Tengah bidang perencanaan
2. Bappeda Jawa Tengah Bidang P2MP
3. Bappeda Semarang bidang pemberdayaan dan perencanaan infrastruktur
4. Pemerintah Kecamatan Banyumanik Kasi Pembangunan
5. Ketua LPMK Kecamatan Banyumanik
6. Ketua Karang Taruna Kecamatan Banyumanik

1.12 Jenis Data

Menurut (Sugiyono 2017, 137) sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

1 Data Primer

Data primer, menurut Trochim, adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh individu atau organisasi untuk tujuan lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk analisis atau penelitian.

Data diperoleh dengan wawancara dan observasi secara langsung jalan yang sedang dalam proses pembangunan dan dokumentasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen berupa arsip rencana pembangunan yang berasal dari BAPPEDA Kota Semarang
2. Dokumen terkait perencanaan, implementasi, dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang
3. Dokumen dari BPS Kota Semarang
4. Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jalan di Kota Semarang
5. Informasi dari buku terkait konsep teori yang digunakan
6. Informasi dari artikel dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional
7. Informasi dari blog maupun website resmi pemerintah dan website umum

2 Data Sekunder

Christensen et al. data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, dan peneliti dapat menggunakannya sebagai sumber informasi tambahan. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, artikel, skripsi, jurnal, e-book, dan konferensi

internasional tentang topik yang sama. Isi dari data sekunder yang didapatkan berkaitan dengan gambaran umum tentang situs penelitian, visi misi, struktur organisasi serta SDM Bappeda Kota Semarang.

1.13 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data harus sehat secara moral. Memahami konsep ini sangat penting: metode ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data menentukan keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data untuk evaluasi awal atau untuk mendapatkan pemahaman responden yang lebih dalam. (Wekke Suardi, 2019). Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada identifikasi individu atau fakta lain tentang pengetahuan dan/atau pandangan mereka sendiri. Pengamatan dengan partisipasi dan diskusi mendalam sering digabungkan dalam penelitian kualitatif. Peneliti terkadang mewawancarai penduduk setempat selain mengumpulkan pengamatan di daerah tersebut. (Abdussamad, 2022). Wawancara kepada pihak terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) infrastruktur jalan di Kota Semarang. Peneliti berfokus pada wawancara mendalam. Analisis penelitian ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan smartphone. Hasil wawancara disusun menjadi transkrip yang diklasifikasikan berdasarkan teori yang digunakan.

2 Observasi

Menurut Marshall (1995), Yang dimaksud dengan ungkapan “melalui observasi, ilmuwan dapat belajar tentang aktivitas dan tujuan yang terkait dengan perilaku” adalah peneliti dapat memperoleh wawasan tentang perilaku dan signifikansinya dengan melihat bagaimana individu bertindak dalam kehidupan nyata. (Wekke Suardi, 2019). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian yaitu Evaluasi Musrenbang Infrastruktur jalan di Kota Semarang. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan perilaku terstruktur dan semi terstruktur dan bertempat di lokasi penelitian yang dipilih.

3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar secara langsung dalam penelitian dan secara tidak langsung melalui. Dokumentasi berkaitan dengan dokumen publik dan pribadi

4 Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan mengacu pada studi teoritis dan referensi lain seperti nilai dan norma lingkungan sosial yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat mengaitkan literatur tentang keuntungan relatif.

1.14 Teknik Analisis Data

Miles & Huberman, dikutip dalam (Sugiono, 2017), mengatakan bahwa analisis data akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis data. Jenis data yang diperoleh menentukan metode analisis data ini. Data kualitatif disajikan dalam tiga tahap, seperti yang dilakukan dalam analisis kualitatif. Tahap-tahap ini

termasuk memadatkan data, menampilkan data, menarik kesimpulan, dan memvalidasi terang. Kondensasi data berarti seleksi, konsentrasi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.

1. Kondensasi Data

Pemadatan data terjadi melalui pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan atau catatan lapangan atas temuan penelitian. Proses pemilihan data dilakukan dengan mengidentifikasi aspek yang paling penting dan terpenting, semua informasi ini dikumpulkan untuk menyempurnakan penelitian. Proses fokus (fokus), memusatkan perhatian pada tujuan penelitian sehingga data dianggap outlier tanpa pola dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini, dapat menghasilkan data yang lebih fokus dan lebih fokus pada hasil yang diinginkan.

2. Menampilkan data

Dengan menyajikan data yang disusun dan diorganisir dalam model relasional sehingga mudah dipahami daripada, menampilkannya akan membantu Anda lebih mudah memahami apa yang terjadi. Visualisasi data memungkinkan untuk memahami apa yang terjadi dan melacak apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (pemeriksaan)

Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, penemuan dapat berupa uraian atau representasi terhadap

objek-objek yang sebelumnya tidak jelas, menjadi jelas dan tepat, dapat disajikan dari segi sebab dan akibat hubungan efek atau hipotesis atau teori interaksi.